

**ANALISIS YURIDIS DAN *SIYĀSAH DUSTŪ RIYAH* TERHADAP
PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

Oleh

Dimas Dwigantara

NIM. C94219078



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Dwigantara
NIM : C94219078
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Yuridis Dan *SiyāṢah Dustūriyah* Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Dimas Dwigantara

NIM. C94219078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dimas Dwigantara

NIM. : C94219078

Judul : Analisis Yuridis Dan *SiyāSah Dustūriyah* Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Oktober 2023

Pembimbing,



Ikhsan Fatah Yasin, SHL, MH
NIP. 198705172015031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Dimas Dwigantara

NIM : C94219078

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Ikhsan Fahah Yasin, S.H.I. M.H.

NIP. 198905172015031006

Penguji III


Dr. Luthfi Ansori, M.H.

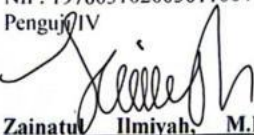
NIP. 198311132015031001

Penguji II


Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.

NIP. 197803102005011004

Penguji IV


Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 19 Maret 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. M. Saiful Anwar, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dimas Dwigantara
NIM : C94219078
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : dwigantaradimas@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN *SIYĀ SAH DUSTŪ RIYAH* TERHADAP
PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Maret 2024

Penulis

Dimas Dwigantara

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian secara normatif dengan judul "Analisis Yuridis Dan *Siyā saḥ Dustū riyah* Terhadap Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang." Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis secara yuridis terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang-undang dan *bagaimana* analisis *Siyā saḥ Dustū riyah* terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang-undang. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji bagaimana pembentukan Undang-Undang Cipta kerja dari sudut pandang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis data, penulis mengadopsi pendekatan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Pendekatan ini melibatkan deskripsi data dan prinsip-prinsip hukum umum, yang kemudian ditarik ke dalam kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta kerja ini banyak sekali hal-hal janggal dan perlu dikaji ulang karena ada kekeliruan secara formil dari pembentukan PERPPU yang dikeluarkan Presiden. Karena PERPPU ini tidak memenuhi aspek kegentingan yang memaksa. Seharusnya Pemerintah sebagai kontrol negara lebih memperhatikan aspek-aspek penting tidak hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

UU Cipta Kerja yang berlaku sekarang sebenarnya masih banyak permasalahan dan seharusnya perlu ada peninjauan kembali agar menjadi undang-undang yang utuh. Permasalahan awal pada Perppu Cipta Kerja yang dinilai cacat secara prosedur karena tidak memenuhi unsur-unsur pembentukan Perppu. Sehingga jika tetap diundangkan, maka secara tidak langsung undang-undang ini secara formil tidak bisa dibenarkan. Ditandai dengan adanya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi perihal uji formil kembali terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Penelitian terdahulu	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SIYĀ SAH DUSTŪ RIYAH.....	22
A. Definisi dan Ruang Lingkup <i>Siyā sah Dustū riyah</i>	22
B. Konsep Perundang-undangan.....	26
C. <i>Omnibus law</i>	28
D. Undang-Undang Cipta kerja.....	34
BAB III PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA	37
A. Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	37
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja	39
C. Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022	45
D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja.....	49

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYĀ SAH DUSTŪ RIYAH	55
A. Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja	55
B. Analisis <i>Siyā sah Dustū riyah</i> Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN_LAMPIRAN.....	74



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Janedjri, M.Gaffar. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: konstitusi pers. 2013.
- Fatimatuz Zahro, Mur Eka. "Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja." *Jurnal Hukum* 1 (2023).
- Intan, Ghita. "Perppu Cipta kerja Resmi Disahkan Jadi UU. 21 Maret 2023. Diakses tanggal 24 Juli 2023 <https://www.voaindonesia.com/a/perppu-cipta-kerja-resmi-disahkan-jadi-uu-/7014353.html>.
- Kurniawan, Fajar. "*Problematika Pembentukan RUU Cipta kerja Dengan Konsep Omnibus law*," *Jurnal Panorama Hukum* 5 (2020).
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011. Diakses 24 Juli 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.
- Tamaddun, "Kontroversi Perpu Cipta kerja Nomor 2 Tahun 2022 Terhadap Ketenagakerjaan." last modified 2023. Diakses 24 Juli 2023 <https://infobaa.umm.ac.id/id/berita-ilmiah/kontroversi-perpu-cipta-kerja-nomor-2-tahun-2022-terhadap-ketenagakerjaan.html>.
- A, Djazuli. "*Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*." Jakarta: kencana, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasa Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sumampouw, Andreini Philia. "Konstitusionalitas Pasal 39 Angka 1 Uu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Ditinjau Dari Perspektif Konstitusi Ekonomi." Salatiga, 2023. Diakses 24 Juli 2023, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/29871/1/T1_312017206_Judul.pdf.
- Juliasara, Anggia Putri. "Eksklusi Dan Inklusi Wacana Pemberitaan Uu Cipta Kerja Pada Media Daring Tempo. Co." Jakarta, 2022. Diakses 24 Juli 2023, <http://repository.unj.ac.id/23443/>.

- Yelvita, Feby Sri. "Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Siyasah Tasyri'iyah." UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022. Diakses 26 Juli 2023, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54283/>.
- hidayat, Fahrul. "Implikasi Ketidakpatuhan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja)." Universitas Andalas, Padang, 2023. Diakses 26 Juli 2023, <http://scholar.unand.ac.id/206837/>.
- Sri Undari, Ni Kadek Ayu. "Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta kerja : Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition." *Jurnal Hukum* 11, no. 4 (2023).
- Ishlaha, Rosyda Saniyya. "Penataan Pengelolaan Hutan Berbasis Sustainable Forest Management Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang." UNS, Surakarta, 2023. Diakses 27 Juli 2023, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/101685/NjE2OTI1/46c60f7e8ac.pdf>.
- Amiruddin, Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Suardita, I Ketut. "Pengenalan Bahan Hukum (PBH)." Universitas Udayana, Bali, 2016, diakses 27 Juli 2023, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf.
- Rojak, Jeje Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Jailaini, Imam Amrusi et al. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: KENCANA, 2017.

- Rio R, Mohamad Bagas. "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5, no. 2 (2021).
- Aziz, Machmud. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem PeraturanPerundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, (2019).
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal* 12, no. 3 (2016).
- Amin, Rizal Irvan. "Omnibus law Antara Desiderata Dan Realita." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020).
- Sodikin. "Paradigma Undang-Undang dengan Konsep *Omnibus law* Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 9, no.1, (2020).
- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep *Omnibus law*." *Jurnal Gema Keadilan* 6, no.3 (2019).
- Satresna, Dhezya Pandu. "Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Japhtn-Han* 2, no. 1 (2023).
- Firdaus, Insan. "Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasarakatan terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021).
- Asshidiqie, Jimly. *Perihal Undang-undang*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Toruan, Henry Donald. "Problems of Harmonization on The Post-Establishment of *Omnibus law* on Job Creation." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 4 (2021).
- Syafriadi, "Undang-Undang Cipta kerja Pasca Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." *Jurnal Hukum* 30 (2023).
- Kusumaatmadja, Mochtar et al. "*Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*." Bagian I, Bandung: Alumni, 2000.
- Tuegeh, Putri Tesalonika et al. "Kajian Yuridis Undang-Undang Cipta kerja Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 9 (2021).

- A., Thea. "10 Dampak UU Cipta kerja Terhadap UU Ketenagakerjaan." 2020. Diakses tanggal 18 September 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/10-dampak-uu-cipta-kerja-terhadap-uu-ketenagakerjaan-lt5fb4e462866ba/>.
- Winarto, Y. "Akhirnya, Pemerintah Rilis 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta kerja". 2021. Diakses tanggal 18 September 2023, <https://nasional.kontan.co.id/news/akhirnya-pemerintahrilis-49-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja>.
- Marwiah, Siti. "Kewenangan Konstitusional Presiden Terhadap Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 3 (2015).
- NurRohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa." *Jurnal Cita Hukum* 1, no.1, (2014).
- Pujianti, Sri. "Perpu Cipta kerja Dinilai Tak Memenuhi Syarat Kegentingan Memaksa." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Januari, 19, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845&menu=2>. Diakses tanggal 18 September 2023
- Dianti, Ni Made Mutia Risna dan Putri Triari Dwijayanti. "Perubahan Kewenangan DPR Terkait Fungsi Anggaran Pada Perppu No. 1 Tahun 2020". *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 12 (2022): 2769.
- Wahyuni, Willa. "Pemerintah Jelaskan Urgensi dan Tujuan Perppu Cipta kerja." Diakses tanggal 18 September 2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-pro-kontra--pemerintah-jelaskan-urgensi-dan-tujuan-perppu-cipta-kerja-lt63c1162de18ac/>.
- Sulistiono, Sandy. "Pembentukan Perppu Cipta kerja Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi." *Jurnal* 1, no. 2, (2023).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja*, 2023. Diakses 27 Juli 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>.
- Republik Indonesia. *Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Diakses 18 September 2023, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>.

- Siahaan, Maruarar. "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan." *Jurnal Konstitusi* 7. No. 4 (2010).
- Triadi, Nia Hasna. "Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2. No.3 (2022).
- Mahkamah Konstitusi. *Pertimbangan Hukum [3.20.4] Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, 2020. Diakses 18 September 2023,
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf.
- Dewantara et al. "Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik dalam Membentuk Pemerintahan yang Efektif." *Jurnal Kertha Negara* 4, no. 1 (2016).
- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan and Anastasia Dhea Widyastuti, "Analisis Yuridis Pembentukan Undang- Undang Cipta kerja Berdasarkan Undang-Undang." 2 (2023).
- Susanto, A. dan A. Rahim. "Analisis Cipta kerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Dan Fiqih Siyasah." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 3 (2022).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A